



## Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam Menanggulangi Bencana Erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki di Kecamatan Wulanggintang dan Kecamatan ILE BURA Kabupaten Flores Timur

Yovita Serviana Ona Watu<sup>1\*</sup>, Theny I. B. K. Pah<sup>2</sup>, Belandina L. Long<sup>3</sup>, Cataryn V. Adam<sup>4</sup>

<sup>1-4</sup> Universitas Nusa Cendana, Indonesia

Email: [vitaona734@gmail.com](mailto:vitaona734@gmail.com)<sup>1\*</sup>, [kurniatipah@staf.undana.ac.id](mailto:kurniatipah@staf.undana.ac.id)<sup>2</sup>, [belandina.long@staf.undana.ac.id](mailto:belandina.long@staf.undana.ac.id)<sup>3</sup>, [catarynadam@staf.undana.ac.id](mailto:catarynadam@staf.undana.ac.id)<sup>4</sup>

\*Penulis Korespondensi: [vitaona734@gmail.com](mailto:vitaona734@gmail.com)

**Abstract** This study aims to analyze the role of the Regional Disaster Management Agency (BPBD) of East Flores Regency in managing the eruption disaster of Mount Lewotobi Laki-Laki during the pre-disaster, emergency response, and post-disaster phases. The study employed a descriptive qualitative method involving 18 informants from BPBD and affected communities in Wulanggintang and Ile Bura Sub-districts. Data were collected through observation, interviews, and documentation. The findings show that during the pre-disaster phase, BPBD implemented preparedness measures through disaster-prone area mapping, the establishment of Disaster Preparedness Teams and Disaster-Resilient Villages, public outreach, and the use of local wisdom. However, outdated contingency plans, limited early warning systems, weak relocation efforts, and low public awareness contributed to panic and casualties during the eruption. In the emergency response phase, BPBD successfully coordinated evacuation efforts, established emergency posts, and distributed logistics effectively. Nevertheless, displaced communities experienced discomfort due to prolonged emergency conditions and limited fulfillment of basic needs in temporary shelters. In the post-disaster phase, BPBD conducted rehabilitation and reconstruction through transportation recovery, trauma healing programs, and permanent housing development based on the Rehabilitation and Reconstruction Plan (R3P). However, limited funding and delays in reconstruction processes remained major challenges. Therefore, improving coordination, institutional capacity, disaster communication, and community participation is essential for effective disaster management.

**Keywords:** BPBD; Disaster Management; East Flores Regency; Mount Lewotobi Laki-Laki; Volcanic Eruption.

**Abstrak** This study aims to analyze the role of the Regional Disaster Management Agency (BPBD) of East Flores Regency in managing the eruption disaster of Mount Lewotobi Laki-Laki during the pre-disaster, emergency response, and post-disaster phases. The study employed a descriptive qualitative method involving 18 informants from BPBD and affected communities in Wulanggintang and Ile Bura Sub-districts. Data were collected through observation, interviews, and documentation. The findings show that during the pre-disaster phase, BPBD implemented preparedness measures through disaster-prone area mapping, the establishment of Disaster Preparedness Teams and Disaster-Resilient Villages, public outreach, and the use of local wisdom. However, outdated contingency plans, limited early warning systems, weak relocation efforts, and low public awareness contributed to panic and casualties during the eruption. In the emergency response phase, BPBD successfully coordinated evacuation efforts, established emergency posts, and distributed logistics effectively. Nevertheless, displaced communities experienced discomfort due to prolonged emergency conditions and limited fulfillment of basic needs in temporary shelters. In the post-disaster phase, BPBD conducted rehabilitation and reconstruction through transportation recovery, trauma healing programs, and permanent housing development based on the Rehabilitation and Reconstruction Plan (R3P). However, limited funding and delays in reconstruction processes remain major challenges. Therefore, improving coordination, institutional capacity, disaster communication, and community participation are essential for effective disaster management.

**Kata Kunci:** BPBD; Erupsi Gunung Api; Flores Timur; Lewotobi Laki-Laki; Penanggulangan Bencana.

## **1. LATAR BELAKANG**

Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat risiko bencana alam yang tinggi karena berada pada jalur pertemuan lempeng tektonik dan kawasan Cincin Api Pasifik (Ring of Fire). Tsabita (2024) menyebutkan bahwa Indonesia berada pada urutan ke-38 dari 181 negara dengan tingkat risiko bencana tertinggi di dunia. Selain itu, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 menjelaskan bahwa bencana merupakan peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat akibat faktor alam, nonalam, maupun manusia. Letak geografis Indonesia yang berada di antara dua benua dan dua samudera menjadikan wilayah ini rentan terhadap gempa bumi, tsunami, dan letusan gunung api (Deby et al., 2019). Purnomo dan Utomo (2008) juga menyebutkan bahwa sekitar 87% wilayah Indonesia memiliki potensi ancaman bencana alam.

Salah satu ancaman bencana yang sering terjadi di Indonesia adalah erupsi gunung api. Indonesia memiliki lebih dari 500 gunung api dan sekitar 130 di antaranya masih aktif sehingga berpotensi menimbulkan aktivitas vulkanik sewaktu-waktu (Siregar & Rogi, 2020). Erupsi gunung api merupakan proses keluarnya magma, gas, dan material vulkanik ke permukaan bumi yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan, korban jiwa, gangguan kesehatan, serta kerugian ekonomi dan sosial masyarakat (Ruslanjari, 2017; Dede et al., 2019). Oleh karena itu, penanggulangan bencana menjadi hal penting yang harus dilakukan secara terencana dan berkelanjutan.

Menurut Hayati Nimah et al. (2022), manajemen bencana merupakan proses terpadu dan berkesinambungan dalam upaya penanggulangan bencana melalui tahap pra bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana. Hal tersebut juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 serta Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Dalam pelaksanaannya, pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) memiliki tanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di tingkat pusat maupun daerah (Rusna, 2018). BPBD dibentuk sebagai lembaga daerah yang berwenang menangani penanggulangan bencana sesuai amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 (Christwin, 2021).

Kabupaten Flores Timur merupakan salah satu wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap aktivitas vulkanik. Secara geologis, wilayah ini memiliki empat gunung api aktif, yaitu Gunung Lewotobi Laki-Laki, Lewotobi Perempuan, Leraboleng, dan Ileboleng. Dari keempat gunung tersebut, Gunung Lewotobi

Laki-Laki menjadi perhatian utama karena mengalami peningkatan aktivitas erupsi sejak akhir tahun 2023 hingga tahun 2025.

Berdasarkan data PVMBG, BNPB, dan BPBD Flores Timur tahun 2026, aktivitas Gunung Lewotobi Laki-Laki mulai meningkat sejak Desember 2023 dengan munculnya gemuruh, gempa vulkanik, dan abu vulkanik sehingga status gunung dinaikkan dari Level I menjadi Level II (Waspada). Aktivitas erupsi terus meningkat sepanjang tahun 2024 hingga mencapai puncak erupsi pada 3 November 2024. Erupsi tersebut menghasilkan abu vulkanik tebal, lontaran batu pijar, hujan pasir, dan aliran lahar panas yang menyebabkan korban jiwa, kerusakan permukiman, serta pengungsian besar-besaran masyarakat. Data BNPB mencatat sebanyak 9–10 orang meninggal dunia, 63 orang luka-luka, dan 4.436 jiwa mengungsi dari delapan desa terdampak di Kecamatan Wulanggitang dan Ile Bura.

Selain menimbulkan korban jiwa, erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki juga menyebabkan kerusakan pada berbagai sektor. Data BPBD Flores Timur menunjukkan bahwa sebanyak 2.904 unit rumah mengalami kerusakan dengan total kerusakan jalan lingkungan mencapai 9.700 m<sup>2</sup>. Pada sektor ekonomi, erupsi mengakibatkan kerusakan lahan pertanian dan perkebunan lebih dari 2,6 juta m<sup>2</sup> serta berdampak pada sektor perikanan dan peternakan. Sementara itu, pada sektor sosial terjadi kerusakan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan tempat ibadah yang menghambat pelayanan publik masyarakat terdampak.

Memasuki tahun 2025, aktivitas Gunung Lewotobi Laki-Laki masih terus berlangsung dengan status Level IV (Awat). Data BPBD Flores Timur tahun 2025 menunjukkan jumlah pengungsi meningkat menjadi 7.960 jiwa yang berasal dari enam desa zona merah Kawasan Rawan Bencana (KRB). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa bencana erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki tidak hanya berdampak pada kerusakan fisik, tetapi juga menimbulkan persoalan sosial, ekonomi, kesehatan, dan psikologis masyarakat.

Dalam kondisi tersebut, BPBD Kabupaten Flores Timur memiliki peran penting dalam penanggulangan bencana mulai dari tahap pra bencana, tanggap darurat, hingga pasca bencana. Pada tahap pra bencana, BPBD melakukan koordinasi, sosialisasi, dan pendirian pos pengamatan gunung api. Saat tanggap darurat, BPBD bersama pemerintah daerah melakukan evakuasi masyarakat, distribusi bantuan logistik, pelayanan kesehatan, dan penanganan pengungsi. Sedangkan pada tahap pasca bencana, BPBD berperan dalam rehabilitasi, pembersihan material vulkanik, serta relokasi dan pemberian bantuan hunian bagi masyarakat terdampak.

Namun demikian, pelaksanaan penanggulangan bencana masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan sarana prasarana, sumber daya manusia, serta sulitnya

memprediksi aktivitas erupsi gunung api. Hirnima (2017) menegaskan bahwa BPBD perlu meningkatkan kapasitas organisasi, sumber daya manusia, infrastruktur, dan kerja sama antar lembaga dalam menghadapi bencana. Selain itu, Akhirianto et al. (2025) menjelaskan bahwa penguatan perencanaan berbasis risiko, partisipasi masyarakat, dan pemanfaatan teknologi sangat penting dalam meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap bencana.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Flores Timur dalam menanggulangi bencana erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki di Kecamatan Wulanggitang dan Kecamatan Ile Bura, serta mengidentifikasi berbagai upaya dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penanggulangan bencana.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

### **Peran**

Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan atau status seseorang dalam masyarakat. Soekanto (2002) menjelaskan bahwa seseorang menjalankan peran ketika melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya. Sementara itu, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan peran sebagai seperangkat perilaku yang diharapkan dari seseorang sesuai posisi yang dimiliki dalam masyarakat. Dengan demikian, peran dapat dipahami sebagai fungsi dan tanggung jawab yang melekat pada individu maupun lembaga.

Menurut Dacosta (2022), peran menjadi unsur penting dalam mengendalikan berbagai peristiwa sosial. David Berry juga menjelaskan bahwa peran berkaitan dengan struktur sosial karena setiap individu menjalankan pola perilaku tertentu sesuai kedudukannya. Dalam pelaksanaannya, peran mencakup persepsi peran, ekspektasi peran, dan konflik peran yang memengaruhi perilaku seseorang dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

### **Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)**

BPBD merupakan lembaga pemerintah daerah yang bertugas melaksanakan penanggulangan bencana di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Pembentukan BPBD diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Menurut Dacosta (2022), BPBD dibentuk untuk mewujudkan penanggulangan bencana yang lebih terintegrasi dan berorientasi pada pengurangan risiko bencana.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 menjelaskan bahwa BPBD memiliki tugas dalam penyusunan kebijakan penanggulangan bencana, koordinasi pelaksanaan penanggulangan bencana, penyusunan peta rawan bencana, pengendalian bantuan logistik,

serta pelaksanaan kegiatan pra bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana. Di Kabupaten Flores Timur, tugas dan fungsi BPBD diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022.

### **Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana**

Penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008. Menurut Nurjanah et al. (2013), kebijakan tersebut menjadi dasar pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana dan terpadu.

Oda et al. (2025) menjelaskan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi tiga tahap, yaitu pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana. Tahap pra bencana dilakukan melalui kesiapsiagaan, mitigasi, dan peringatan dini. Tahap saat bencana dilakukan melalui tanggap darurat, evakuasi korban, dan distribusi logistik. Sedangkan tahap pasca bencana dilakukan melalui rehabilitasi dan rekonstruksi untuk memulihkan kondisi masyarakat dan infrastruktur terdampak.

### **Tahapan Manajemen Bencana**

Menurut Soehatman Ramli (2010), manajemen bencana merupakan proses terencana dalam mengelola bencana melalui tiga tahapan utama, yaitu pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana.

Tahap pra bencana meliputi kesiapsiagaan, mitigasi, dan peringatan dini untuk mengurangi risiko bencana. Tahap saat bencana dilakukan melalui tindakan tanggap darurat seperti evakuasi korban, pemenuhan kebutuhan dasar, dan perlindungan kelompok rentan. Sedangkan tahap pasca bencana dilakukan melalui rehabilitasi dan rekonstruksi guna memulihkan kehidupan masyarakat dan memperbaiki sarana prasarana yang rusak akibat bencana.

### **Bencana Erupsi Gunung Berapi**

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 menjelaskan bahwa bencana merupakan peristiwa yang mengancam kehidupan masyarakat dan menimbulkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, serta kerugian material. Salah satu bencana alam yang sering terjadi di Indonesia adalah erupsi gunung api.

Gunung api merupakan rekahan di permukaan bumi yang mengeluarkan magma, gas, dan material vulkanik. Menurut Nazila (2022), erupsi gunung api dibedakan menjadi erupsi efusif dan erupsi eksplosif. Erupsi eksplosif biasanya menghasilkan abu vulkanik, lontaran material pijar, awan panas, dan lahar dingin yang dapat membahayakan masyarakat di sekitar gunung.

## **Dampak Bencana Erupsi Gunung Berapi**

Bencana erupsi gunung api menimbulkan dampak besar terhadap kehidupan masyarakat. Gebrina et al. (2024) dalam Gregor (2025) menjelaskan bahwa bencana dapat menyebabkan kehilangan tempat tinggal, harta benda, serta trauma psikologis.

Menurut Benson dan Clay dalam Nurjanah (2013), dampak bencana terdiri atas dampak langsung, tidak langsung, dan dampak lanjutan. Dampak langsung berupa kerusakan fisik dan korban jiwa, dampak tidak langsung berupa terganggunya aktivitas ekonomi dan sosial, sedangkan dampak lanjutan berupa meningkatnya kemiskinan dan terhambatnya pembangunan.

Rahman et al. (2026) menjelaskan bahwa erupsi gunung api dapat merusak lingkungan, permukiman, lahan pertanian, serta infrastruktur publik. Selain itu, abu vulkanik dan gas berbahaya dapat menyebabkan gangguan kesehatan, khususnya gangguan pernapasan, serta memicu pengungsian masyarakat terdampak.

## **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Menurut Moleong dalam Zagario et al. (2021), penelitian kualitatif bertujuan memahami fenomena sosial berdasarkan pengalaman, perilaku, persepsi, dan motivasi subjek penelitian dalam kondisi alamiah. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan fakta dan kondisi yang ditemukan di lapangan secara mendalam tanpa melakukan generalisasi luas (Sugiyono, 2005). Penelitian ini dilakukan di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Flores Timur. Fokus penelitian diarahkan pada peran BPBD Kabupaten Flores Timur dalam menanggulangi bencana erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki pada tahap pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana. Tahap pra bencana meliputi kesiapsiagaan dan peringatan dini. Tahap saat bencana meliputi tanggap darurat dan penanggulangan logistik, sedangkan tahap pasca bencana meliputi rehabilitasi dan rekonstruksi berdasarkan tahapan manajemen bencana menurut Soehatman Ramli (2010).

Informan penelitian terdiri dari Kepala BPBD, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, beberapa staf teknis BPBD, serta masyarakat terdampak erupsi di Kecamatan Wulanggintang dan Kecamatan Ile Bura. Informan dari BPBD dipilih menggunakan teknik sampling jenuh (sensus), sedangkan masyarakat dipilih menggunakan teknik accidental sampling. Total informan dalam penelitian ini berjumlah 18 orang. Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dan

observasi langsung terhadap informan penelitian, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen, laporan, arsip, berita, dan berbagai literatur yang relevan dengan penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi (Sugiyono, 2012). Observasi dilakukan di Kantor BPBD Kabupaten Flores Timur dan wilayah terdampak erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki. Wawancara dilakukan secara langsung menggunakan pedoman wawancara sesuai fokus penelitian. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi dan memperkuat data penelitian berupa foto, arsip, laporan, dan dokumen pendukung lainnya. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman dalam Baba (2017), yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dipilah sesuai fokus penelitian, kemudian disajikan secara sistematis untuk mempermudah penarikan kesimpulan. Keabsahan data diuji menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari berbagai informan, sedangkan triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memastikan data yang diperoleh valid dan konsisten (Sugiyono, 2020).

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Peran BPBD Kabupaten Flores Timur dalam Penanggulangan Bencana Erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki**

Penanggulangan bencana erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki oleh BPBD Kabupaten Flores Timur dilaksanakan melalui tiga tahapan utama, yaitu pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPBD telah menjalankan berbagai program penanggulangan bencana secara terstruktur, meskipun masih menghadapi sejumlah kendala pada aspek kesiapsiagaan, sistem peringatan dini, tanggap darurat, distribusi logistik, rehabilitasi, dan rekonstruksi.

##### **Pra Bencana**

Pada tahap pra bencana, BPBD Kabupaten Flores Timur melaksanakan kegiatan kesiapsiagaan melalui sosialisasi, mitigasi, pembentukan Tim Siaga Bencana (TSB), Kampung Siaga Bencana (KSB), serta penyediaan peta Kawasan Rawan Bencana (KRB) Gunung Lewotobi Laki-Laki. Program kesiapsiagaan dilakukan sejak tahun 2017 bekerja sama dengan berbagai lembaga seperti PVMBG, Dinas Sosial, CRS, CIS, dan IPPS.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan TSB dan KSB memberikan dampak positif terhadap kesiapan masyarakat dalam menghadapi erupsi. Masyarakat menjadi lebih memahami jalur evakuasi, penggunaan perlengkapan darurat, dan langkah penyelamatan

diri ketika terjadi erupsi. Kondisi ini terlihat pada erupsi besar tanggal 3 November 2024, di mana masyarakat yang telah mengikuti pelatihan kesiapsiagaan cenderung lebih siap menghadapi situasi darurat.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Tsabita (2024) yang menyatakan bahwa pembentukan desa tangguh bencana dan sekolah siaga bencana dapat meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi ancaman erupsi gunung api. Selain itu, Fitriani et al. (2021) menegaskan bahwa kesiapsiagaan bencana memerlukan keterlibatan aktif pemerintah, masyarakat, dan stakeholder terkait melalui sistem mitigasi yang terstruktur.

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan beberapa kendala. Pertama, keterlambatan pembentukan KSB menyebabkan sebagian masyarakat belum siap saat gejala awal erupsi terjadi pada Desember 2023. Kedua, keterbatasan anggaran menghambat pelaksanaan simulasi dan pelatihan secara merata. Ketiga, sebagian masyarakat tidak dapat mengikuti kegiatan sosialisasi karena faktor pekerjaan dan aktivitas ekonomi sehari-hari. Selain itu, masyarakat zona merah KRB belum memperoleh relokasi awal sebelum terjadi erupsi besar.

### **Peringatan Dini**

BPBD Flores Timur juga melaksanakan sistem peringatan dini melalui koordinasi lintas lembaga dan pemanfaatan teknologi komunikasi. Media utama yang digunakan adalah grup WhatsApp “Salam Tangguh Bencana” yang melibatkan BPBD, pemerintah desa, tokoh masyarakat, TNI, Polri, BNPB, dan PVMBG. Selain itu, masyarakat masih memanfaatkan alat kearifan lokal seperti kentongan, lonceng gereja, dan gong sebagai sarana penyebaran informasi bencana.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem peringatan dini telah berjalan secara terstruktur melalui alur informasi resmi dari PVMBG kepada BNPB, pemerintah daerah, BPBD, hingga pemerintah desa sebelum disampaikan kepada masyarakat. Temuan ini sejalan dengan Eriska (2024) yang menyatakan bahwa efektivitas sistem peringatan dini sangat dipengaruhi oleh koordinasi antar lembaga dan kecepatan penyampaian informasi kepada masyarakat terdampak.

Akan tetapi, penelitian menemukan adanya kelemahan serius pada sistem deteksi dini. Erupsi besar tanggal 3 November 2024 terjadi secara tiba-tiba ketika status gunung masih berada pada level III (Siaga). Keterlambatan peningkatan status menjadi level IV (Awat) menyebabkan masyarakat panik dan berdampak pada tingginya korban jiwa serta luka-luka. Selain itu, pemasangan radar, sirene, papan informasi bencana, dan jalur evakuasi di beberapa desa KRB belum terealisasi sepenuhnya.

Dengan demikian, sistem peringatan dini BPBD Flores Timur masih memerlukan penguatan, terutama pada aspek teknologi pendeteksi aktivitas vulkanik dan infrastruktur evakuasi masyarakat.

## **Saat Kejadian Bencana**

### ***Tanggap Darurat***

Pada tahap tanggap darurat, BPBD Flores Timur membentuk Tim Reaksi Cepat (TRC) untuk melakukan penyelamatan korban, evakuasi masyarakat, pendataan kerusakan, serta pengelolaan pengungsi. BPBD juga bekerja sama dengan TNI, Polri, BNPB, tenaga kesehatan, dan berbagai lembaga kemanusiaan dalam penanganan darurat erupsi tanggal 3 November 2024.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPBD bergerak cepat dengan mendirikan pos lapangan, tenda pengungsian, dapur umum, dan pusat distribusi logistik di beberapa lokasi pengungsian. Prioritas penanganan diberikan kepada kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas. Temuan ini mendukung penelitian Bathiar (2018) yang menyatakan bahwa efektivitas tanggap darurat sangat dipengaruhi oleh koordinasi cepat dan keterlibatan multipihak.

Meskipun demikian, kondisi erupsi yang terjadi pada tengah malam, pemadaman listrik, dan keterbatasan sarana komunikasi menyebabkan proses evakuasi awal mengalami hambatan. Dampaknya, korban jiwa dan luka-luka cukup tinggi, terutama di Desa Klatanlo.

### ***Penanggulangan Logistik***

Dalam penanggulangan logistik, BPBD mendistribusikan bantuan berupa sembako, air bersih, obat-obatan, pakaian, peralatan rumah tangga, dan layanan dasar lainnya kepada masyarakat terdampak. Pengungsi dibagi menjadi dua kategori, yaitu pengungsi terpusat di hunian sementara (Huntara) dan pengungsi mandiri yang tinggal di rumah keluarga atau kerabat serta menerima Dana Tunggu Hunian (DTH).

Penelitian menemukan bahwa distribusi logistik pada masa awal tanggap darurat berjalan cukup baik. Namun dalam jangka panjang muncul berbagai kendala, seperti kualitas air bersih yang menurun, biaya listrik setelah subsidi berakhir, masalah sanitasi, dan meningkatnya angka putus sekolah akibat keterbatasan ekonomi masyarakat pengungsi. Selain itu, lokasi pengungsian juga menghadapi ancaman banjir dan kerusakan drainase.

Meskipun demikian, partisipasi masyarakat dalam mengatasi masalah pengungsian cukup tinggi, seperti melakukan kerja bakti, patungan biaya listrik, dan membangun saluran air secara mandiri. Kondisi ini menunjukkan adanya solidaritas sosial yang kuat di tengah situasi bencana.

## **Pasca Bencana**

### ***Rehabilitasi***

Pada tahap rehabilitasi, BPBD Flores Timur melakukan pembersihan jalan dan lingkungan terdampak erupsi, pemulihan layanan dasar, serta trauma healing bagi masyarakat pengungsi. Kegiatan trauma healing dilaksanakan bersama NGO dan LSM melalui berbagai aktivitas sosial dan hiburan untuk anak-anak maupun orang dewasa.

Selain itu, pemerintah juga melanjutkan program DTH dan Huntara sambil menunggu realisasi program Hunian Tetap (Huntap). Penelitian menemukan bahwa rehabilitasi dilakukan secara kolaboratif dengan melibatkan masyarakat, pemerintah desa, dan lembaga kemanusiaan. Namun proses pemulihan dinilai masih lambat karena besarnya kerusakan pada lima sektor utama, yaitu perumahan, infrastruktur, ekonomi, sosial, dan lintas sektor.

### ***Rekonstruksi***

Pada tahap rekonstruksi, pemerintah daerah melalui BPBD mulai melaksanakan pembangunan Huntap bagi masyarakat terdampak. Program ini mencakup pembangunan rumah tahan bencana, relokasi masyarakat dari kawasan rawan bencana, penyediaan lahan produktif, serta pemulihan infrastruktur dan layanan sosial ekonomi masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rekonstruksi dilakukan secara bertahap karena jumlah kerusakan yang sangat besar, yaitu lebih dari 2.277 unit rumah terdampak. Hingga tahun 2026, sebagian Huntap telah selesai dibangun dan mulai dihuni masyarakat. Selain itu, pemerintah juga menyusun Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) sebagai dasar pelaksanaan pemulihan jangka panjang.

Meskipun demikian, proses rekonstruksi masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan pendanaan, lamanya proses birokrasi, dan kondisi pengungsi yang terlalu lama tinggal di Huntara maupun rumah keluarga. Permasalahan sanitasi dan drainase di lokasi pengungsian juga masih menjadi perhatian utama pemerintah daerah.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, BPBD Kabupaten Flores Timur telah menjalankan peran penanggulangan bencana erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki pada tahap pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008, dan Perda Kabupaten Flores Timur Nomor 3 Tahun 2022. Pada tahap pra bencana, BPBD melakukan kesiapsiagaan melalui sosialisasi, pembentukan tim siaga, pemetaan kawasan rawan bencana, dan sistem peringatan dini. Saat bencana, BPBD

melaksanakan tanggap darurat, evakuasi korban, serta distribusi logistik dan bantuan kepada masyarakat terdampak. Sementara pada tahap pasca bencana, BPBD melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi melalui pemulihan layanan dasar, pembangunan hunian sementara dan hunian tetap, serta penyusunan dokumen rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Namun demikian, penelitian juga menemukan beberapa kendala, seperti keterbatasan sarana dan prasarana kebencanaan, minimnya sistem peringatan dini, keterbatasan anggaran, serta berbagai persoalan pelayanan di lokasi pengungsian yang masih memerlukan perhatian pemerintah daerah dan BPBD.

### **Saran**

BPBD Kabupaten Flores Timur perlu meningkatkan kapasitas kelembagaan, kualitas sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana kebencanaan, terutama sistem peringatan dini, jalur evakuasi, dan fasilitas pengungsian. Pemerintah daerah juga perlu mempercepat pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi agar masyarakat terdampak segera memperoleh kepastian hunian dan pemulihan kehidupan sosial ekonomi. Selain itu, koordinasi antara BPBD, pemerintah daerah, PVMBG, NGO, dan masyarakat perlu terus diperkuat agar penanggulangan bencana dapat berjalan lebih efektif, cepat, dan terkoordinasi. Masyarakat juga diharapkan meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam kegiatan kesiapsiagaan bencana serta mematuhi arahan pemerintah demi mengurangi risiko dan dampak bencana di masa mendatang.

### **DAFTAR REFERENSI**

- Akhirianto, N. A., Ma'rufatin, A., Wardani, K. S., Kayadoe, F. J., & Kongko, W. (2025). Bridging policy and practice in tsunami disaster risk reduction: Evaluating local implementation challenges in eastern Indonesia. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, *124*, 105491. <https://doi.org/10.1016/j.ijdr.2025.105491>
- Baba, M. A. (2017). *Analisis data penelitian kualitatif*. Makassar: Penerbit Aksara Timur.
- Bathiar. (2018). *Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam menanggulangi risiko bencana tanah longsor di Kabupaten Sinjai* [Skripsi]. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Christwin, Y. (2021). *Manajemen bencana dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ende* [Skripsi]. Universitas Flores.
- Comission, E. (2022). *Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan BPBD*. Flores Timur: Pemerintah Kabupaten Flores Timur.
- Dacosta, N. H. (2022). *Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam menanggulangi bencana banjir di Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Malaka* [Skripsi]. Universitas Nusa Cendana.

- Deby, A. C., Cikusin, Y., & W, R. P. (2019). Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam tahap kesiapsiagaan (Studi pada Kantor BPBD Kota Batu). *Jurnal Respon Publik*, 13(3), 34–41. <http://riset.unisma.ac.id/index.php/rpp/article/view/3695>
- Dede, C., et al. (2019). Edukasi penanganan korban erupsi gunung berapi pada karang taruna. *Prosiding Pengabdian Masyarakat*, 1760–1772.
- DetikBali. (2025). Jadi gunung yang pertama erupsi di tahun 2025, ini dampak letusan Gunung Lewotobi Laki-Laki. *Tempo.co*. <https://www.tempo.co/lingkungan/jadi-gunung-yang-pertama-erupsi-di-tahun-2025-ini-dampak-letusan-gunung-lewotobi-laki-laki--1190526>
- Eriska Nahda Tsabita, S. A. S. (2024). Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam tahap pra bencana erupsi Gunung Merapi. *Jurnal Mahasiswa Wacana Publik*, 4, 195–206.
- Fitriani, I., et al. (2021). Analisis manajemen mitigasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) terhadap bencana alam erupsi Gunung Tangkuban Perahu. *JIMEA | Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 5(1), 91–111.
- Gebrina, R., et al. (2024). Narrative literature review: Dampak psikososial pasca bencana pada dewasa. *Tanjungpura Journal of Nursing Practice and Education*, 6(1), 25–34.
- Hayati, N., et al. (2022). Analisis manajemen penanggulangan bencana erupsi Gunung Merapi berdasarkan hospital disaster plan. *Jurnal Kesehatan Dan Kebencanaan*, 1(4), 43–50.
- Hirnima, Z. M. (2017). *Studi deskriptif dampak pengembangan capacity building organisasi pada tingkat responsivitas tanggap darurat bencana di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ponorogo* [Skripsi]. Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
- Moleong, L. (2012). *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: Remadja Karya.
- Nazila, A. R. A. (2022). *Peran aktif Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam penanggulangan bencana erupsi Gunung Semeru di masa pandemi Covid-19 di Kabupaten Lumajang* [Skripsi]. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq.
- Nurjanah, R. Sugiharto, D., Kuswanda, Siswanto, B., & Adikoesoemo. (2013). *Manajemen bencana*. Bandung: Alfabeta.
- Oda, P. S. S., Marchezini, V., Lotta, G. S., Mota Ferreira, A., Cotting, A. L. M., Cota Dias, K. G., & Pacheco Calderon, O. L. (2025). State, institutional, and organizational capacities in disaster risk management. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 129, 105777. <https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2025.105777>
- Purnomo, H., & Utomo, H. (2008). Keefektifan kerjasama antar lembaga dalam operasi pemulihan terhadap bencana alam: Studi empiris di Yogyakarta dan Jawa Tengah. *Journal of Indonesian Economy and Business*, 23(4).
- Rahman, et al. (2026). Navigating risk and resilience: Exploring cultural, local responses, livelihoods, and institutions to Mount Merapi's volcanic hazards. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 133, 105929. <https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2025.105929>
- Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.

- Republik Indonesia. (2008). *Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Ruslanjari, D., Wahyunita, D. I., & Permana, S. (2017). Peran gender pada siklus manajemen bencana di sektor sosial ekonomi rumah tangga tani (bencana alam gempa bumi dan letusan gunung api). *Jurnal Geografi*, 7(1).
- Rusna, R. (2018). *Kerjasama pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Luwu Utara* [Skripsi]. Universitas Hasanuddin.
- Siregar, T., Rogi, O., & Tondobala, L. (2020). Pemetaan kerentanan terhadap bahaya bencana vulkanik Gunung Soputan Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Perencanaan Wilayah Dan Kota*, 25(1), 1–16.
- Soekanto, S. (2002). *Teori peranan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono. (2012). *Memahami penelitian kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Zagarino, A., et al. (2021). Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam manajemen bencana erupsi Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang. *Jurnal Syntax Admiration*, 2(5), 762–773.  
<https://doi.org/10.46799/jsa.v2i5.224>